

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Masyarakat Pertanian

Pertanian merupakan aktivitas yang telah dijalankan oleh masyarakat sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Selain berburu dan meramu masyarakat jaman dulu sudah mengenal pertanian. Hal ini ditegaskan oleh Sanderson (2000: 91) yang menyatakan bahwa, meskipun masyarakat pemburu-peramu mungkin telah mendapatkan pengetahuan semenjak sepuluh ribu tahun yang lalu mengenai metode menjinakkan (*domesticate*) tumbuhan dan hewan, tidak sampai 10.000 tahun yang lalu sebagian masyarakat pemburu dan peramu telah mempraktekkan pertanian dengan pola hidup menetap pada berbagai desa. Pertanian hanya sebagai kegiatan subsistensi masyarakat waktu itu. Pertanian belum dijadikan alat ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan tersier.

B. Ekonomi Informal

Pada dasarnya konsep dari ekonomi informal lahir di dunia ketiga. Hal ini dikemukakan oleh Portes dan Haller (dalam Smelser & Swedberg, 2005: 404) yang menyatakan bahwa “*the concept of informal economy was born in the Thirld World, out of a series of studies on urban labor markets in Africa*”. Awal mula berkembangnya ekonomi informal berasal dari dunia ketiga. Negara-negara yang masih dalam tahap negara berkembang. Terkait dengan konsep ekonomi informal, menurut Feige (dalam Smelser & Swedberg, 2005: 405) menyatakan bahwa “*the informal economy comprises economic actions that bypass the costs of, and are excluded from the protection of, laws and administrative rules covering “property relationship, commercial licensing, labor contracts, torts, financial credit, and social security systems”*”. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa ekonomi informal terdiri atas tindakan ekonomi yang mengabaikan biaya, dan tidak disertakan perlindungan hukum dan aturan administrasi yang meliputi hubungan properti, lisensi komersial, kontrak kerja, ganti rugi, kredit keuangan,

dan sistem jaminan sosial. Dalam ekonomi informal ini aktivitas ekonomi tidak memiliki jaminan secara legal.

Sektor ekonomi informal memiliki berbagai macam karakteristik. *The informal economy was taken to refer to an "urban way of doing things" characterized by (1) low entry barriers in terms of skill, capital, and organization; (2) family ownership of enterprises; (3) small scale of operation; (4) labor-intensive production with outdated technology; and (5) unregulated and competitive markets* (Sethuraman; dalam Smelser & Swedberg, 2005: 404). Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dijabarkan bahwa ekonomi informal mengacu pada "cara masyarakat urban melakukan sesuatu" yang ditandai dengan (1) sumber daya yang rendah dalam hal keterampilan, modal, dan organisasi; (2) kepemilikan keluarga perusahaan; (3) operasi skala kecil; (4) produksi padat karya dengan teknologi usang; dan (5) pasar yang tidak diatur dan kompetitif. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor ekonomi informal tidak dibutuhkan ketrampilan dan sumber daya yang tinggi.

Ekonomi informal memiliki banyak konsep. Secara lebih rinci ILO/WIEGO (2013) mendefinisikan informalitas ekonomi ke dalam tiga konsep utama, yakni:

1. Sektor informal, dimana mengacu pada produksi dan lapangan pekerjaan pada perusahaan yang tidak terdaftar secara resmi;
2. Lapangan kerja informal, yang memfokuskan pada pekerjaan di luar peraturan perlindungan tenaga kerja setempat, baik itu pada perusahaan formal maupun informal;
3. Ekonomi informal, yang mana mencakup seluruh perusahaan, pekerja, dan aktivitas yang berlangsung di luar kerangka peraturan ketenagakerjaan setempat dan output yang mereka hasilkan.

Pada dasarnya, ekonomi informal lebih mengarah kepada kegiatan perekonomian yang berada di luar payung hukum dan tidak ada jaminan sosial bagi tenaga kerja pada sektor ekonomi informal.

Ekonomi informal menekankan pada kegiatan yang bersifat informal. Kegiatan-kegiatan informal adalah sebuah acara untuk melakukan sesuatu yang

dicirikan: (1) mudah masuk, (2) bersandar pada sumber daya lokal, (3) usaha milik keluarga, (4) operasi skala kecil, (5) padat karya dan *adapted technology*, (6) ketrampilan diperoleh diluar sistem formal sekolah, (7) tidak diatur dan pasar kompetitif. Sebagai tambahan informal sektor juga kerap diabaikan, jarang didukung, kadang diatur dan kadang secara aktif dihambat oleh pemerintah (Firdausy:1995,2). Sektor informal memang menjadi pilihan bagi sebagian masyarakat untuk bertahan hidup. Pemerintah jarang melakukan pemberdayaan terkait dengan sektor ekonomi informal.

Bagi masyarakat, sektor ekonomi informal dapat dijadikan alternatif kegiatan ekonomi masyarakat. Masih banyaknya pengangguran, sempitnya lahan pertanian, alih fungsi lahan pertanian dan minimnya pekerja pada sektor ekonomi formal menjadikan masyarakat mengalihkan kegiatan ekonominya pada sektor informal. Sektor ekonomi informal dapat menjadi solusi karena pada sektor ekonomi informal tidak diperlukan *skill* yang tinggi. Hidayat (dalam Effendi, 1995 : 91) mengemukakan tentang karakteristik dalam sektor informal ini sebagai berikut : 1) kegiatan usaha tidak terorganisasi dengan baik, karena timbulnya unit usaha tidak mempergunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di sektor formal; 2) pada umumnya unit usaha tidak mempunyai izin usaha; 3) pola kegiatan usaha tidak beraturan baik dalam arti lokasi maupun jam kerja; 4) pada umumnya kebijakan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai ke sektor ini; 5) unit usaha mudah keluar masuk dari sub sektor ke sub sektor lain; 6) teknologi yang bersifat tradisional; 7) modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasi juga relatif kecil; 8) untuk menjalankan usaha tidak diperlukan pendidikan formal, karena pendidikan yang diperlukan diperoleh dari pengalaman sambil bekerja; 9) pada umumnya unit usaha termasuk golongan yang mengerjakan sendiri usahanya dan kalau mengerjakan, buruh berasal dari keluarga; 10) sumber dana modal usaha pada umumnya dari tabungan sendiri atau dari lembaga keuangan yang tidak resmi; dan 11) hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh golongan kota atau desa yang berpenghasilan rendah tetapi kadang-kadang juga yang berpenghasilan menengah. Berdasarkan kriteria

tersebut, sektor ekonomi informal menjadi pilihan yang rasional bagi masyarakat untuk bertahan hidup.

C. Pedagang Kaki Lima

Istilah Pedagang Kaki Lima bermula dari jaman kolonial Belanda. Pada saat Pemerintah Belanda era Rafles istilah Pedagang Kaki Lima mulai muncul. Menurut Widjajanti (2012: 416) Pedagang Kaki Lima (PKL) berawal dari kata "*five feet*", yang merupakan jalur pejalan kaki di depan bangunan toko selebar lima kaki. Kendati demikian, area tersebut justru menjadi tempat berjualan bagi pedagang kecil yang bersifat informal. Sehingga pedagang yang berjualan di area pejalan kaki dinamakan dengan Pedagang Kaki Lima (PKL). PKL (Pedagang Kaki Lima) yang berjualan di area jalan masyarakat dapat dikategorikan sebagai sebuah aktivitas ekonomi di dalam masyarakat.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan suatu aktivitas ekonomi yang berada pada sektor informal. Menurut Abdullah (2012: 43) PKL merupakan penyebutan usaha ekonomi sektor informal yang melakukan aktivitas di trotoar atau kaki lima. Dalam pengertian ini, PKL (Pedagang Kaki Lima) termasuk ke dalam sektor informal. Indikator dari sektor informal adalah terbatasnya tempat, marginal, sumber daya atau *skill* yang rendah, dan modal yang terbatas. PKL dipandang sebagai sektor kelompok marginal di masyarakat yang memiliki keterbatasan, baik keterbatasan administrasi maupun finansial, sehingga tidak memungkinkan untuk terjun di sektor formal (Abdullah, 2012: 43).

Pedagang Kaki Lima (PKL) memiliki beberapa karakteristik yang membedakan aktivitas ekonomi PKL (Pedagang Kaki Lima) dengan aktivitas ekonomi formal. Menurut McGee & Yeung (2012: 416), bahwa karakteristik aktivitas PKL dapat diidentifikasi berdasarkan jenis komoditas dagangannya, yaitu:

1. Bahan mentah dan setengah jadi (*unprocessed and semiprocessed foods*), seperti daging, buah, sayuran, beras, dan sebagainya.

2. Makanan siap konsumsi (*prepared foods*), terdiri dari bahan-bahan yang dapat langsung dikonsumsi saat itu juga, biasanya berupa makanan dan minuman.
3. Non-makanan (*nonfood items*), jenis barang dagangan ini cakupannya lebih luas dan biasanya tidak berupa makanan, misalnya tekstil sampai dengan obat-obatan, dan lain-lain.
4. Jasa (*services*), yang termasuk dalam kategori jasa pelayanan, seperti tukang semir sepatu, potong rambut.

D. Pemberdayaan Masyarakat

Pada dasarnya pemberdayaan dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas manusia. Saat ini telah terjadi perubahan paradigma pembangunan. Perubahan tersebut berupa pola pertumbuhan ekonomi ke pemenuhan kebutuhan hidup hingga kini diarahkan pada peningkatan kualitas manusia (*human quality*). Sebagaimana *statement United Nation Development Programme* (UNDP), dalam menentukan indikator pembangunan yang dirumuskan dalam Human Development Index (HDI), yaitu: Indeks Pengetahuan; Indeks Kesehatan; dan Indeks Daya Beli (Widjajanti, 2010: 40). Berdasarkan pada pernyataan tersebut maka pembangunan saat ini harus menitikberatkan pada pembangunan manusia. Adapun dalam pembangunan manusia meliputi aspek pengetahuan, kesehatan dan daya beli. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu masih belum memenuhi kriteria pembangunan sesuai dengan standar UNDP (*United Nation Development Programme*).

Program pemberdayaan masyarakat harus dilaksanakan secara maksimal dan tepat sasaran untuk menghadapi situasi yang saat ini terjadi. Menurut Komisi Brundtland (McMichael, 2008: 240) terkait dengan konsep *sustainable development* mengemukakan bahwa *sustainable development as meet(ing) the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan yang berkelanjutan sebagai sebuah pemenuhan kebutuhan-

kebutuhan saat ini tanpa memperdulikan atau mengkhawatirkan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Terkait dengan pemberdayaan, pada sebuah masyarakat desa pada dasarnya akan lebih mudah untuk dilakukan pemberdayaan yang dimotori oleh masyarakat itu sendiri. Hal ini dikarenakan, pada masyarakat desa memiliki ikatan batin yang sangat kuat. Tonnies mengemukakan bahwa terdapat sebuah masyarakat yang terikat karena ikatan batin sangat kuat. Tonnies menyebut sebagai *gemeinschaft (community)*. Menurut Tonnies (dalam Worsley, 1985: 409) kehidupan dalam masyarakat kategori *gemeinschaft* adalah “*all intimate, private dan exclusive living together is understood as life in gemeinschaft (community)*. In *gemeinschaft (community)* with one’s family, one lives from birth on bound to it in weal and woe”. Berdasarkan pengertian tersebut kategori masyarakat *gemeinschaft* adalah masyarakat yang penuh dengan keintiman hidup bersama-sama. Dalam masyarakat kategori *gemeinschaft* kehidupan masyarakat seperti satu keluarga, terikat sebagai satu kehidupan dalam kesejahteraan dan kesengsaraan. Tipe masyarakat *gemeinschaft* ini merupakan tipikal masyarakat desa. Dalam masyarakat Desa akan saling bahu membahu untuk mensejahterakan warganya. Pada masyarakat desa bentuk pemberdayaan yang *compatible* adalah bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga sesuai dengan konsep *gemeinschaft* dari Ferdinand Tonnies yang menyatakan bahwa masyarakat *gemeinschaft* saling merasakan kesejahteraan dan kesengsaraan bersama-sama.

E. Diversifikasi ekonomi

Konsep diversifikasi lebih mengarah kepada pendekatan sevara ekonomi. Diversifikasi yang secara makro berarti penganekaan komoditas yang dihasilkan oleh suatu wilayah atau suatu usaha (Suryana, 1990: 114). Suatu usaha yang dilakukan di dalam masyarakat tidak hanya mengacu kepada satu usaha saja, tetapi bisa mengacu kepada banyak usaha. Seroang buruh tani tidak hanya bekerja sebagai buruh tani saja, tetapi bisa juga bekerja pada sektor lain seperti berdagang.

Pengertian lain dari diversifikasi adalah *“in finance, diversification means reducing risk by investing in a variety assets”* (<https://books.google.co.id/books?id;> diakses pada tanggal 8 Maret 2017). Berdasarkan pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa pada bidang keuangan, diversifikasi berarti mengurangi risiko dengan berinvestasi dalam berbagai aset. Diversifikasi merupakan investasi dalam berbagai macam aset. Jika pekerjaan merupakan aset, maka diversifikasi pekerjaan merupakan penganekaragaman atau penambahan jenis pekerjaan.

F. Difusi Inovasi

Teori difusi inovasi berawal dari salah seorang sosiolog Perancis yang bernama Gabriel Tarde dengan memperkenalkan kurva difusi berbentuk “S” (*S-shaped Diffusion Curve*). Pada dasarnya kurva ini menggambarkan bagaimana suatu inovasi diadopsi seseorang atau sekelompok orang dilihat dari dimensi waktu. Pada kurva ini ada dua sumbu di mana sumbu yang satu menggambarkan tingkat adopsi dan sumbu yang lainnya menggambarkan dimensi waktu (Putri, 2013: 56). Pemikiran Tarde ini sangat penting untuk perkembangan teori difusi inovasi. Rogers (1983: 1) mengatakan: *“Tarde’s S-shaped diffusion curve is of current importance because “most innovations have an S-shaped rate of adoption”*. Sejak saat itu tingkat adopsi atau tingkat difusi menjadi fokus kajian penting dalam penelitian-penelitian sosiologi.

Teori difusi inovasi merupakan suatu proses suatu inovasi disampaikan (dikomunikasikan) melalui saluran-saluran tertentu sepanjang waktu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Hal tersebut sesuai dengan pengertian difusi oleh Rogers (1983: 5), yaitu *“Diffusion is the process by which an innovation is communicated through certain channels over time among the members of a social system”*. Selanjutnya difusi merupakan suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus dan berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan yang berupa gagasan baru. Hal ini disampaikan Rogers (1983: 5) sebagai berikut *“It is a special type of communication, in that the messages are concerned with*

new ideas”. Pada dasarnya difusi merupakan sebuah komunikasi yang berkaitan dengan penyebaran pesan dari ide-ide yang baru.

Pada perkembangan selanjutnya, teori difusi inovasi juga dikaitkan dengan proses pembangunan masyarakat. Perubahan sosial merupakan inti dari pembangunan masyarakat. Sedangkan inovasi merupakan awal untuk terjadinya perubahan sosial. Rogers dan Shoemaker (2013: 64) menjelaskan bahwa proses difusi merupakan bagian dari proses perubahan sosial. Perubahan sosial adalah proses dimana perubahan terjadi dalam struktur dan fungsi sistem sosial. Perubahan sosial terjadi dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu: (1) Penemuan (*invention*), (2) difusi (*diffusion*), dan (3) konsekuensi (*consequences*). Penemuan adalah proses dimana ide atau gagasan baru diciptakan atau dikembangkan. Difusi adalah proses dimana ide atau gagasan baru dikomunikasikan kepada anggota sistem sosial, sedangkan konsekuensi adalah suatu perubahan dalam sistem sosial sebagai hasil dari adopsi atau penolakan inovasi.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian tentang “Diversifikasi Rasionalitas Pekerjaan Buruh Tani (*Peasant*) menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Junrejo Kota Batu” adalah penelitian yang berjudul “Transformasi Petani Mranggen menuju Masyarakat Industri”. Penelitian ini berawal dari tergusurnya lahan pertanian dan semakin menurunnya tingkat ekonomi petani yang tidak punya lahan yang dalam hal ini adalah buruh tani. Tergusurnya lahan para petani merupakan proses ‘proletarisasi’ dalam kehidupan desa, dan membengkaknya kelas petani yang tidak memiliki lahan garapan dengan segala dampaknya bukanlah fenomena baru di Indonesia. Geertz (1965: 6) dengan penelitiannya di Mojokuto menunjukkan bahwa hal tersebut sudah terjadi sejak masa penjajahan, tepatnya sekitar pertengahan abad ke-19. Ia menunjukkan bahwa proletariat Mojokuto sebagian besar terbentuk bukan oleh proletarianisasi para petani setempat, melainkan oleh migrasi populasi kelas bawah dari daerah-daerah lain ke wilayah-wilayah yang berdekatan dengan Mojokuto (Sobary, 2007: 2).

Akhir dari penelitian ini penelitian menyimpulkan bahwa *pertama*, bersamaan dengan berkembangnya Kota Semarang, desa-desa di Mranggen kemudian seolah-olah sama atau mirip dengan kehidupan kota Semarang sebagai tempat ketergantungannya. *Kedua*, industrialisasi membawa dampak positif maupun negatif. *Ketiga*, dengan nilai baru yang berkembang dalam masyarakat industri, agama masih memiliki tempat dalam *public life* dan *private life*. Dalam ranah kehidupan sosial kemasyarakatan, agama masih mempengaruhi dalam kehidupan mereka, tercermin dalam ritual keagamaan seperti slametan, yasinan, tahlilan, ziarah kubur, dan lain sebagainya. Begitu juga sebaliknya, industri telah mempengaruhi kehidupan ekonomi, sehingga mereka mampu menjalankan ibadah haji, shadaqah, zakat, dan lain-lain. Kedekatan hubungan Tuhan masyarakat Mranggen tidak hanya dibangun di atas ritus-ritus keagamaan semata, tetapi juga dicapai melalui kegiatan ekonomi, perdagangan, bekerja sesuai profesi, dan solidaritas sosial.

H. Kerangka Teori

Teori aksi dari Parsons ini berawal dari kekagumannya terhadap empat sosiolog ternama yaitu Emile Durkheim, Alfred Marshall, Vilfredo Pareto, dan Max Weber. Teori aksi yang terinspirasi dari keempat sosiolog ini teruang pada sebuah karyanya yaitu *The Structure Of Social Action*. Titik perhatian dalam karya Parsons *The Structure of Social Action* adalah konsep tindakan sosial yang rasional, suatu konsep yang semula merupakan sumbangan teoritis Max Weber (Poloma, 2007: 169). Dalam teori aksinya ini Parsons mengatakan bahwa :

“Dalam masyarakat yang kontemporer suatu tindakan lebih cenderung rasional, yaitu mencapai tujuan atau sasaran dengan sarana-sarana yang paling tepat”.

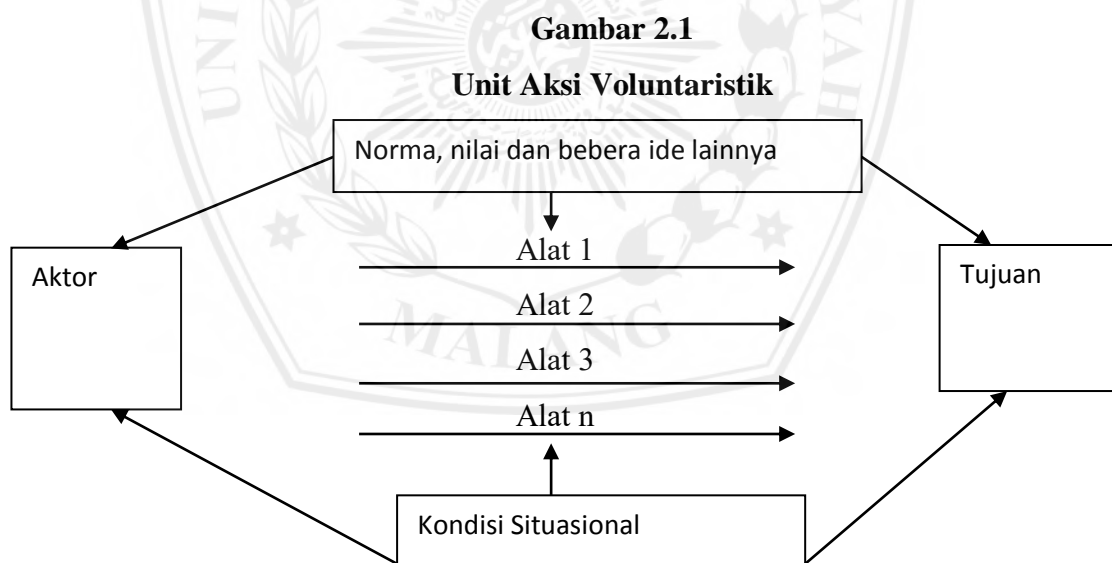
Pada intinya teori aksi ini menggambarkan bahwa dalam tindakan di masyarakat modern lebih cenderung bersifat rasional yaitu menetapkan cara untuk mencapai tujuannya. Tidak ada individu yang bertindak tanpa memiliki tujuan tertentu (Susilo, 2008: 114).

Pada teori aksi yang sering disebut dengan aksi voluntaristik ini terdapat beberapa bagian yang mendasar yaitu :

- a) Aktor, yang merupakan seorang individu.
- b) Aktor yang menunjukkan pencapaian tujuan.
- c) Aktor yang juga menguasai alat-alat alternative untuk mencapai tujuan.
- d) Aktor yang menghadapi variasi kondisi situasional.
- e) Aktor diatur oleh nilai dan norma yang mempengaruhi aktor terhadap pertimbangan sebuah tujuan dan jenis alat yang dipilih untuk mencapai tujuan itu.
- f) Aksi melibatkan aktor yang membuat keputusan tentang alat untuk mencapai tujuan, kesemua itu dihambat oleh ide-ide dan kondisi situasional.

(Parsons dalam Turner : 1998 ; 29-30)

Konsepsi voluntaristik oleh Parsons bisa digambarkan, sebagai berikut :



Sumber : Parsons dalam Turner : 1998 ; 30

Pada gambar tersebut mendeskripsikan sebuah konsepsi voluntaristik. Proses penggambaran tersebut sering disebut dengan unit aksi, dimana aksi sosial melibatkan sebuah rangkaian unit aksi dari seorang aktor atau lebih (Parsons

dalam Turner : 1998 ; 30). Dalam gambar tersebut tampak bahwa seorang aktor akan menetapkan berbagai macam alat untuk memperoleh tujuan yang diinginkannya. Untuk meraih tujuannya tersebut seorang aktor dalam menetapkan alat-alat untuk mencapai tujuannya dipengaruhi oleh norma, nilai dan beberapa ide lainnya serta kondisi situasional.

Pada dasarnya, teori aksi Parsons tidak sepenuhnya mengikuti Weber dalam tindakan rasionalnya. Bahkan, tujuan teori tindakan ini adalah merevisi kelemahan dalam tindakan sosial Weber yang kurang memerhatikan pengaruh-pengaruh dari lingkungan eksternal sekitar terhadap aktor (Susilo, 2008: 115). Dalam merumuskan teorinya, Parsons tidak tertumpu pada satu tokoh saja, tetapi menjalinkan analisis teori-teori yang dikembangkan oleh Emile Durkheim, Max Weber, Pareto dan Alfred Marshall. Sesuai penjelasan Parsons (dalam Susilo, 2008: 115-116), kerangka referensi tindakan mengandung pengertian bahwa suatu tindakan secara logis menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- a. Tindakan mengisyaratkan pelaku atau yang biasa kita sebut dengan aktor. Aktor merupakan pemburu tujuan. Ia punya alat, cara dan teknik.
- b. Guna keperluan, definisi tindakan harus ada tujuannya (suatu keadaan masa depan yang akan dikejar tindakan itu).
- c. Tindakan harus dimulai dalam situasi yang kecenderungan-kecenderungan berbeda dalam satu atau lebih keadaan yang dikejar aktor. Sedangkan situasi itu ada yang bisa dikendalikan atau dijaga supaya tidak berubah.
- d. Situasi yang bisa dikendalikan disebut kondisi-kondisi tindakan, sedangkan situasi yang tidak bisa dikendalikan disebut sarana.
- e. Dalam pilihan atas beragam alternatif, terdapat orientasi normatif.

Selain teori aksi dari Parsons, dalam penelitian ini juga digunakan teori pilihan rasional oleh Coleman. Teori ini digunakan untuk menganalisa mengenai rasionalitas diversifikasi buruh tani (*peasant*) menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Junrejo Kota Batu. Analisa teori ini berawal dari fenomena semakin sempitnya lahan pertanian yang memberikan dampak pada peluang buruh tani untuk bekerja di sektor pertanian. Industri pariwisata yang tumbuh subur di Kota Batu menjadikan buruh tani memiliki opsi terkait dengan orientasi ekonominya.

Buruh tani tidak hanya menggantungkan perekonomiannya pada sektor agraris saja, tetapi buruh tani juga dapat mencoba opsi lain dalam sektor ekonomi informal, seperti menjadi PKL (Pedagang Kaki Lima) di kawasan wisata atau Alun-alun Kota Batu.

Dalam pandangan teori pilihan rasional menganggap bahwa aktor akan menentukan tujuan dengan preferensi-preferensinya. Terdapat beberapa asumsi dasar terkait dengan teori pilihan rasional. Beberapa asumsi dasar dari teori pilihan rasional (dalam Turner, 1998: 304) dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Individu beorientasi pada tujuan
2. Individu memiliki seperangkat preferensi secara hirarkis
3. Dalam menentukan pilihan, individu membuat pertimbangan yang rasional berdasar pada:
 - Perilaku yang mengacu pada hirarki preferensi
 - Resiko pada masing-masing preferensi
 - Cara yang terbaik untuk memaksimalkan pilihan

Pada dasarnya teori pilihan rasional lebih menekankan pada seorang aktor / individu yang menentukan tujuan berdasarkan preferensi-preferensi yang rasional. Prinsip dasar teori pilihan rasional oleh Coleman secara mendalam (dalam social theory.apk/aplikasi dalam sistem operasi android) dapat dijabarkan sebagai berikut:

”the main principle of rational choice theory is that people are ”actors” who act to gain something for themselves. Often this involves interacting with other people who are seeking the same ”resources” as other actors. This assumes that all people act in self-serving ways and look out their best interest first”

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip utama teori pilihan rasional adalah bahwa individu sebagai aktor yang bertindak untuk memperoleh sesuatu bagi diri mereka sendiri. Seringkali, hal ini melibatkan interaksi dengan orang lain dengan tujuan yang sama seperti aktor lain. Hal ini mengasumsikan bahwa semua orang bertindak dengan caranya sendiri dan tertuju pada kepentingan terbaik.